



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan Renja	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPDD	1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	9
2.2.1. Sekretaris DPRD	9
2.2.2. Kepala Bagian Umum	10
2.2.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	11
2.2.2.2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	11
2.2.3. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	13
2.2.3.1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah	13
2.2.3.2. Sub Bagian Perundang-Undangan	14
2.2.4. Bagian Keuangan	14
2.2.4.1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi	15
2.2.4.2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukaan	16
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang	17
2.3.1. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Berdasarkan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	17
2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	1
3.1. Tujuan dan Sasaran OPD	1
3.2. Program dan Kegiatan OPD	2
BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK	
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	1
4.1. Memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang	1
BAB V.PENUTUP	1

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, aparaturnya Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang diberikan pengetahuan dan kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2025 menguraikan program, rencana kegiatan dan sasaran tahunan berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya dalam rangka mencapai visi, misi dan sasaran.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2025 merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) serta berorientasi kepada hasil (*result oriented*) sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 ini pada dasarnya merupakan representasi tugas pokok dan fungsi OPD. Berkenaan dengan itu, sebagaimana konsep manajemen pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta profesional dalam hal perencanaan kinerja dan penganggaran. Dalam aplikasinya, penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan pengejawantahan semangat reformasi birokrasi yang menghendaki pencapaian maksimal dalam etos kerja.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja dan diharapkan mampu memberikan manfaat serta dampak positif bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara informasi, evaluasi maupun sebagai parameter dalam peningkatan kinerja organisasi.

Pangkalpinang, Juli 2024

Sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang

Drs. AKHMAD ELVIAN
NIP 196510141989031004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mempunyai kegiatan yang prioritas dalam mendukung program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

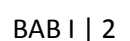
- 1) Renja OPD merupakan dokumen program dan kegiatan yang secara substansial penerjemahan dari visi dan misi walikota terpilih yang telah tertuang dalam RENSTRA 2024 - 2026 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dan telah tertuang juga dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- 2) Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024
- 3) Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025, yang mana ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 – 2026 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Penyusunan dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

- Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, trakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Ecaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang;
- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor Tahun Tentang Perubahan atas
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2024. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah serta Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah

Menjelaskan Program dan Kegiatan beserta besaran dana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan adalah menginterpretasikan sejauh mana kemampuan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hingga tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam satu bidang urusan wajib yaitu urusan wajib pemerintah fungsi penunjang administrasi.

Hasil Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan persentase terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Di tahun 2023 dilaksanakan 2 (Dua) program dengan 56 (Lima Puluh Enam) kegiatan prioritas. Adapun kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2023, diantaranya adalah sebagai berikut :

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4	2				SEKRETARIAT DPRD
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiaian Bahan Tanggapan Pemeriksaan
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	2	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD
4	2	1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Perda
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Hasil dari pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan ukuran terhadap pelaksanaan Renja tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2023 dituangkan dalam bentuk matrik sebagaimana tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2023 DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2025	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)			Target program/ kegiatan RKPD tahun 2024 (tahun n - 1)	Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan		SKPD Penanggung jawab
										Target RKPD Tahun 2023 (tahun n - 2)	Realisasi RKPD Tahun 2024 (tahun n - 2)	Tingkat realisasi		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2021 (%)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
2	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD. Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD..	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	12 bulan	100%	12 bulan	100%	100%	12 bulan	12 bulan	100%	Sekretariat DPRD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pangkalpinang, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang merupakan OPD yang menangani urusan pemerintah fungsi penunjang administrasi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok yaitu. Secara spesifik, mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, baik fungsi penetapan Peraturan Daerah, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah, tugas Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang diarahkan untuk membantu DPRD Pangkalpinang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wakil rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan Sekretariat DPRD,
- b. penyediaan administrasi keuangan DPRD,
- c. penyediaan rapat-rapat DPRD,
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) serta Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

2.2.1. Sekretaris DPRD

- (1). Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;

- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris DPRD membawahi:
- a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 - c. Bagian Keuangan;

2.2.2 Kepala Bagian Umum

- (1). Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :
- a. perencanaan dan penyusunan program di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - c. pelaksanaan lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
 - e. pengoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan dan pengelolaan bahan informasi daerah lingkup Sekretariat DPRD dan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

2.2.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1). Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Umum di lingkup Umum dan Kepegawaian.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan data lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. pelaksanaan di lingkup Umum, meliputi Penatausahaan naskah dinas dan kearsipan; penyiapan bahan penyusunan rencana, program serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; pengaturan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD; pelayanan pimpinan dan anggota DPRD serta pengaturan pemeliharaan lingkungan rumah dinas pimpinan dan sekretariat DPRD; pengaturan akomodasi pimpinan dan anggota DPRD; pemberian pelayanan, pengaturan, pengelolaan, pengadaan perlengkapan dan sarana prasarana pimpinan dan anggota DPRD.
 - d. penyelenggaraan dan pelaksanaan dilingkup kepegawaian meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi dan pembinaan, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, diklat dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD; pengadministrasian keanggotaan DPRD; pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan kepegawaian pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Umum dan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD

2.2.2.2 Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

- (1). Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

- (2). Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bagian Umum dilingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan data lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di Lingkungan Sekretariat DPRD;
 - b. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di Lingkungan Sekretariat DPRD;
 - c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol meliputi fasilitas hubungan kerjasama DPRD dengan instansi pemerintah dan lembaga sosial lainnya; pemberian pelayanan dan fasilitas aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD; pemberian pelayanan dan fasilitas informasi pers yang ditujukan kepada masyarakat; penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan serta anggota DPRD; pelayanan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota DPRD dan sekretariat DPRD; pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD; pendokumentasian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan sekretariat DPRD; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di Lingkungan Sekretariat DPRD.

2.2.3 Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- (1). Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2). Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan.
- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program dilingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan.
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang- Undangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :
 - a. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Perundang-undangan;

2.2.3.1 Sub Bagian Persidangan dan Risalah

- (1). Sub Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (2). Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dilingkup Persidangan dan Risalah.

- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :
- a. penyiapan data lingkup Persidangan dan Risalah;
 - b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Persidangan dan Risalah;
 - c. penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah meliputi pelayanan teknis pengaturan dan persiapan persidangan atau rapat; penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat; fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah.
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Persidangan dan Risalah.

2.2.3.2 Sub Bagian Perundang-undangan

- (1). Sub Bagian Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
- (2). Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dilingkup Perundang-undangan.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan data lingkup Perundang-undangan
 - b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perundang-undangan;
 - c. penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Perundang-undangan, dokumentasi dan pengarsipan hasil persidangan atau rapat; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perundang-undangan.

2.2.4 Bagian Keuangan

- (1). Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD
- (2). Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup keuangan

- (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan penyusunan program dilingkup keuangan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan keuangan lingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bagian Keuangan membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :
 - a. , Anggaran dan Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan;

2.2.4.1 Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi

- (1). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Anggaran dan Verifikasi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (2). Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan dilingkup Anggaran dan Verifikasi.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan data lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
 - b. pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
 - c. pelaksanaan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, anggaran dan verifikasi meliputi penyiapan bahan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian

Kinerja, rencana umum penganggaran, rencana kerja anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat DPRD), Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (laporan Evaluasi Renja dan Renstran Sekretariat DPRD), Penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Sekretariat DPRD);

- d. Pelaksanaan lingkup anggaran dan verifikasi meliputi melaksanakan verifikasi (pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku); dan
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan verifikasi.

2.2.4.2 Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

- (1). Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
- (2). Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan dilingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.
- (3). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan data lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;
 - b. melaksanakan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;
 - c. pelaksanaan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan meliputi pembayaran gaji; tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; pengaturan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan Sekretaris DPRD; serta penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan

- d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang akan dibahas antara lain:

1. kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan;
2. kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian realisasi anggaran.

2.3.1 Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan

Sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, maka tugas utama Sekretariat DPRD sebagaimana ketentuan yang berlaku, melaksanakan urusan wajib melalui program dan kegiatan pada tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 2.3.1
KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2023

KODE REK					URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI 2023
					A. LRA	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
4	02				SEKRETARIAT DPRD	64.069.490.592
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	27.990.738.492
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	0
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.060.627.138

4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.060.627.138
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0
4	02	01	2.02	06	Pengelola dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	0
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
4	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	155.000.000
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.000.000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.466.465.455
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.842.855
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.750.000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	505.400.000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	423.627.000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	113.292.600
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.528.000
4	02	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.725.000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.300.000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	683.474.000
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	243.050.000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299.700.000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.724.000
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	833.723.470
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180.249.550

4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.470.000
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.003.920
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.095.477
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.136.684
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	437.726.793
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.543.000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	187.689.000
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	14.819.262.880
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	14.459.262.880
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	315.000.000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	45.000.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.182.090.072
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	962.375.072
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	219.715.000
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	36.078.752.100
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	6.615.595.150
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.615.595.150
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	0
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	0
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.273.100.000
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	2.988.600.000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.500.000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	860.000.000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	420.000.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat	140.393.250
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	0
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	140.393.250
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	1.958.605.276

4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	1.958.605.276
4	02	02	2.08		Fasilitas Tugas DPRD	23.091.058.424
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	22.350.000.000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	741.058.424

Merujuk pada Tabel 2.3.1 di atas dapat dianalisa bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggaraan penunjang administrasi pemerintahan, namun ada beberapa kegiatan di dalam program yang tidak terlaksana

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang secara umum, terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:

TABEL: 2.4.1
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

PERUMUSAN ISU –ISU PENTING SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG	ASPEK KAJIAN
• Etos kerja dan disiplin Pegawai belum baik	SUMBER DAYA MANUSIA
• Pengelolaan aset masih belum tertib	PRASARANA DAN SARANA PENDUKUNG
• Sistem pengendalian internal belum sepenuhnya dilakukan dengan baik	TATA KELOLA ORGANISASI
• Penerapan penggunaan teknologi informasi belum maksimal dilakukan	SISTEM DATA DAN INFORMASI

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2017

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang secara umum, terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:

TABEL: 2.4.2
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD KOTA PANGKALPINANG

PERUMUSAN ISU –ISU PENTING DPRD KOTA PANGKALPINANG	ASPEK KAJIAN
• Rekomendasi temuan aparat pengawas internal maupun eksternal, hasil audit dan survei belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh OPD	FUNGSI PENGAWASAN
• Kebijakan penganggaran belum sepenuhnya mengakomodir ketentuan penyediaan atas belanja yang diarahkan; yang bersifat mengikat/wajib; yang ditentukan persentasenya sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan	FUNGSI PENGANGGARAN
• Ketentuan dalam Perda belum sepenuhnya ditegakkan • Masih banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah	FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Sumber: Hasil analisis, Tahun 2017

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2023. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Sekretariat DPRD yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan anggaran yang sudah jelas.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan tugas pokoknya sebagai OPD yang melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka disusun visi dan misi Sekretariat DPRD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Visi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah :

**“MEWUJUDKAN SEKRETARIAT DPRD SEBAGAI LEMBAGA YANG
ANDAL, KREDIBEL, DAN PROAKTIF DALAM MENDUKUNG KINERJA
DPRD”.**

Untuk mewujudkan visi tersebut, dilaksanakan dalam bentuk misi sesuai dengan peran dan tupoksi Sekretariat DPRD, sehingga misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme sumber daya manusia
2. Memfasilitasi kerjasama (yang baik) antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Dari misi tersebut, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mempunyai tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan (masyarakat/pemangkukepentingan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien
2. Meningkatkan/memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD

Dengan sasaran strategis yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang transparan, aspiratif, partisipatif dan menjadi solusi pemecahan permasalahan-permasalahan masyarakat

Tujuan dijabarkan dalam sasaran. Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sasaran menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Visi : “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur)			
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya implementasi reformasi, birokrasi pemerintahan daerah	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan.	Meningkatnya kualitas penetapan perda dan pembentukan perda melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD yang efektif sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Peningkatan kualitas perda yang dihasilkan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi

3.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2006-2026 dalam Arah Kebijakan Pembangunan 5 Tahun Kedua. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 terlampir dalam Tabel 3.2.2 di bawah ini.

TABEL 3.2.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	5	8	9	11	15	16
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				72.787.934.514			1.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				72.787.934.514			1.000.000
4	02				SEKRETARIAT DPRD				72.787.934.514			1.000.000
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100% 86 Nilai	100 % 85 Nilai	29.388.150.271		100% 86Nilai	1.000.000
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah tepat waktu	100%	100 %	3.500.000		100%	1.000.000
4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000
4	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500.000
4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100%	100 %	9.531.336.401		100%	0
4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	9.529.336.401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan							

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

					Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100%	100 %	105.000.000		100% 0
4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0
4	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16 Orang	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100% 100%	100 %	845.962.400		100% 100%	0
4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	29.972.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	74.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	450.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100 %	525.530.000		100%	0
4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	250.530.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %	1.580.000.000		100%	0
4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	210.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.260.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	979.080.000		0
4	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	101.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	677.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100% 100%	100 %	15.450.000.000		0,00

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						
					Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		30 Orang/Bulan	15.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						
					Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		1 Paket	400.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						
					Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		30 Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD	100% 100%	100 %	367.741.470		100% 100%
4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		2 Laporan	67.741.470,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		3 Laporan	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	100 %	100 %	43.399.784.243		100 %
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20Perda/Peraturan DPRD	20 Perda/Peraturan DPRD	14.757.342.695		20Perda/Peraturan DPRD
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah						

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

					Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		4 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						
					Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		15 Dokumen	14.757.342.695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						
					Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						
					Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD. Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD..	100% 100% 100%	100 % 100 % 100 %	6.709.105.696		100% 100% 100%
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD						
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		6 Dokumen	5.150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		19 Orang	1.135.692.624	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

										(PAD)		
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							
						Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		7 Orang	418.413.072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD							
						Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		2 Dokumen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	100% 100%	100 % 100 %	135.000.000		100% 100%	0
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							
						Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dokumen	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses							
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	130.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	100 %	865.556.000		100%	0
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi							
						Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		3 Dokumen	865.556.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD.	100% 100%	100 % 100 %	20.932.779.852		100% 100%	0
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		92 Dokumen	20.932.779.852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
J U M L A H									72.787.934.514			1.000.000

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penyusunan Agenda Kerja Penyiapan Dokumen Penyusunan rencana kerja perlu dilakukan sebagai acuan bagi tim penyusun dalam proses penyiapannya. Rencana kerja mengatur rincian kegiatan apa yang perlu dilakukan, siapa yang melakukan, metoda pelaksanaannya bagaimana, serta kapan kegiatan tersebut akan dilakukan. Langkah-langkah penyusunan rencana kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rincian agenda kegiatan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan dokumen RKPD dan memberi catatan batas waktu (deadline) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan.
2. Merumuskan keluaran/output serta metoda pelaksanaan dari setiap rincian kegiatan tersebut.
3. Menyusun matrik rencana kerja yang berisikan rincian kegiatan, keluaran, metoda dan jadwal pelaksanaan.
4. Menjabarkan rencana kerja penyusunan RKPD.

Pengumpulan Data dan Informasi Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung dengan data dan informasi yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Data/informasi yang dikumpulkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan secara jelas status, kedudukan, capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah.

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RKPD dan menuangkannya dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan pemantauan.
2. Melakukan pengumpulan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel 3 memperlihatkan contoh check list untuk inventarisasi sumber dan jenis data/ informasi yang diperlukan dalam penyusunan RKPD.

Penyiapan Daftar Isi Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi proses penyusunan

RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD, penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran hingga penyusunan RKA-SKPD dan RAPBD. Oleh karena itu substansi RKPD seyogyanya mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan penganggaran. Substansi utama yang termuat dalam rancangan awal RKPD, meliputi

- a. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu
- b. Rancangan kerangka ekonomi daerah
- c. Arah kebijakan keuangan daerah, termasuk indikasi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.
- d. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
- e. Rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu indikatif SKPD.

Informasi pagu indikatif bagi setiap SKPD dan indikasi belanja bagi hasil serta belanja bantuan keuangan merupakan informasi yang harus disampaikan dalam rancangan awal RKPD. Ketersediaan informasi ini akan sangat dibutuhkan oleh setiap SKPD sebagai acuan dalam merumuskan rancangan rencana kerja SKPD. Pagu indikatif SKPD dan indikasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan tersebut juga berfungsi sebagai koridor pendanaan dalam pembahasan forum SKPD maupun dalam pelaksanaan musrenbang, sehingga proses pelaksanaan musrenbang menjadi lebih efektif dan efisien.

Pengalokasian besaran pagu indikatif berorientasi pada asas pemenuhan kebutuhan, efisiensi, keadilan, dan penilaian kinerja, serta sinergi sumber-sumber pendanaan.

Perhitungan pagu indikatif anggaran program dan kegiatan yang dialokasikan bagi setiap SKPD didasarkan pada kebutuhan SKPD untuk melaksanakan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah prioritas sesuai tingkat dan sasaran pelayanan program dan kegiatan.

Dari langkah-langkah diatas maka Sekretariat DPRD telah menyiapkan rancangan awal kegiatan ditahun 2025 seperti tabel berikut :

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)			
2					3	4	5	8	9			
					SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH							72.787.934.514
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							72.787.934.514
4	0 2				SEKRETARIAT DPRD							72.787.934.514
4	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100% 86 Nilai	100 % 85 Nilai	29.388.150.271			
4	0 2	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah tepat waktu	100%	100 %	3.500.000			
4	0 2	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	500.000			
4	0 2	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	500.000			
4	0 2	0 1	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	500.000			
4	0 2	0 1	2.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							
						Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	500.000			
4	0 2	0 1	2.0 1	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	500.000			
4	0 2	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan	500.000
4	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Laporan	500.000
4	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	100%	100 %	9.531.336.401
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	9.529.336.401
4	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	500.000
4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	500.000
4	0	0	2.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				
						Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		1 Dokumen	500.000,00
4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	500.000,00
4	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	100%	100 %	105.000.000
4	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	30.000.000
4	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		16 Orang	75.000.000
4	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100% 100%	100 %	845.962.400

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi				
	2	1	6	1	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	29.972.400
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	2	1	6	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	36.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
	2	1	6	3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	74.990.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
	2	1	6	4		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	450.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				
	2	1	6	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	100.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				
	2	1	6	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4 Dokumen	25.000.000
4	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu				
	2	1	6	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	30.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	2	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	100.000.000
4	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100 %	525.530.000
4	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel				
	2	1	7	5		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		10 Unit	200.000.000
4	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	2	1	7	6		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Unit	250.530.000
4	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	2	1	7	0		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2 Unit	75.000.000
4	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100 %	1.580.000.000
	2	1	8						

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	2	1	8	1		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	10.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	2	1	8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	210.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				
	2	1	8	3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	100.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
	2	1	8	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1.260.000.000
4	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100%	100 %	979.080.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	2	1	9	1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	101.680.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
	2	1	9	2		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	677.400.000
4	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				
	2	1	9	6		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		2 Unit	50.000.000
4	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	2	1	9	9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	100.000.000
4	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
	2	1	9	1		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	50.000.000
4	0	0	2.1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100% 100%	100 %	15.450.000.000
4	0	0	2.1	000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				
	2	1	5	1		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		30 Orang/Bulan	15.000.000.000, 00

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

4	0	0	2.1	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				
	2	1	5	2		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		1 Paket	400.000.000
4	0	0	2.1	000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				
	2	1	5	3		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		30 Orang	50.000.000
4	0	0	2.1		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Laporan Layanan Administrasi DPRD	100% 100%	100 %	367.741.470
4	0	0	2.1	000	Fasilitasi Fraksi DPRD				
	2	1	6	2		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		2 Laporan	67.741.470,00
4	0	0	2.1	000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				
	2	1	6	3		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		3 Laporan	300.000.000
4	0	0			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase keterpenuhan layanan terhadap pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan perda	100 %	100 %	43.399.784.243
4	0	0	2.0		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	20Perda/Peraturan DPRD	20 Perda/Peraturan DPRD	14.757.342.695
4	0	0	2.0	000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				
	2	2	1	1		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		4 Dokumen	0
4	0	0	2.0	000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				
	2	2	1	2		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		15 Dokumen	14.757.342.695
4	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				
	2	2	1	3		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		1 Dokumen	0
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Tata Tertib DPRD				
	2	2	1	5		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1 Dokumen	0
4	0	0	2.0		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD. Persentase terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD..	100% 100% 100%	100 % 100 % 100 %	6.709.105.696
4	0	0	2.0	000	Orientasi DPRD				
	2	2	4	1		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1 Dokumen	0

RANWAL RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG

2025

4	0	0	2.0	000	Pendalaman Tugas DPRD				
	2	2	4	2		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		6 Dokumen	5.150.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				
	2	2	4	4		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		19 Orang	1.135.692.624
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				
	2	2	4	5		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		7 Orang	418.413.072
4	0	0	2.0	000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD				
	2	2	4	8		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		2 Dokumen	5.000.000
4	0	0	2.0		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat Persentase tersusunnya laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat.	100% 100%	100 % 100 %	135.000.000
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				
	2	2	5	2		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dokumen	5.000.000
4	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Reses				
	2	2	5	3		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	130.000.000
4	0	0	2.0		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Laporan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	100 %	865.556.000
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				
	2	2	7	2		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		3 Dokumen	865.556.000
4	0	0	2.0		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Laporan Fasilitasi Tugas DPRD.	100% 100%	100 % 100 %	20.932.779.852
4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				
	2	2	8	1		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		92 Dokumen	20.932.779.852
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				
	2	2	8	2		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 Laporan	0
J U M L A H									72.787.934.514

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang diharapkan dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam dokumen renstra. DPRD Kota Pangkalpinang yang terkait sebagai unsur penunjang langsung jalannya pemerintahan dengan prioritas pembangunan pada tahun tertentu, maka kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang pada tahun tersebut harus mencerminkan pencapaian prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2016. Untuk kegiatan yang diprioritaskan tersebut harus disertai dengan kebutuhan anggaran yang dirinci kedalam volume dan satuan harga. Dengan demikian, penentuan alokasi anggaran kepada kegiatan-kegiatan prioritas dapat dilakukan secara terukur.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2025 diarahkan untuk mencapai beberapa misi Pemerintah Kota sebagaimana penjelasan sebelumnya dengan mengacu pada sasaran strategis serta program prioritas.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD lebih pada aspek administrasi dan teknis. Secara administrasi, permasalahan yang muncul adalah lemahnya sistem administrasi dengan belum sempurnanya penerapan standar operasional prosedur. Sedangkan secara teknis, minimnya SDM yang berkualifikasi di bidang perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa menjadi kendala yang cukup serius. Namun dapat diatasi dengan adanya LPSE dan ULP. Kedepan, diharapkan kelemahan - kelemahan tadi dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri.